

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Banyaknya pekerjaan sektor informal, jumlah penduduk yang melebihi jumlah lapangan pekerjaan dan kualitas manusia yang rendah menjadikan permasalahan kemiskinan terjadi di berbagai negara. Menurut World Bank (2000), jumlah kemiskinan dunia pada tahun 2015 menurun sebesar 1.3% dari beberapa tahun sebelumnya. Namun pada tahun yang sama, Indonesia mengalami peningkatan kemiskinan sebesar 40% dari jumlah populasi jika standar kemiskinan dunia adalah \$2 sehari. Oleh karena itu pemerintah Indonesia berupaya keras dalam mengurangi kemiskinan.

Standar Internasional kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang mengalami kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well-being*) dengan jumlah konsumsi \$1,9/hari (World Bank, 2000). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik pangan maupun non-pangan) dengan jumlah konsumsi Rp 387.160/bulan. Dalam konteks negara Indonesia, kemiskinan memiliki pengertian yang sedikit berbeda dengan kriteria dunia karena seseorang dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan menurut (BPS, 2000).

Sedangkan menurut Suryawati (2005), kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*) 2) ketidakberdayaan (*powerless*) 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*) 4) ketergantungan (*dependence*) dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Menurut pandangan Islam, kemiskinan merupakan fakta yang dihadapi oleh seluruh umat manusia, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Islam memandang bahwa masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh seperti sandang, pangan dan papan adalah definisi dari masalah kemiskinan. Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 268, kemiskinan merupakan sebuah ujian keimanan yang diberikan kepada setiap umat manusia. Jika manusia tidak dapat mengatasi permasalahan kemiskinan, perbuatan tercela dijadikan sebuah alasan kekhawatiran untuk mengentas kemiskinan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 268:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dalam mengukur keberhasilan sebuah negara, kemiskinan merupakan elemen yang harus dihilangkan. Dikarenakan jika dalam suatu negara memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto) yang melambat (Shafira,

2017). Usaha penekanan tingkat kemiskinan dilakukan oleh setiap negara untuk mencapai kesejahteraan negara.

Data World Bank (2000) mengenai *Global Poverty Head Count Ratio* atau jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan di dunia menjelaskan bahwa kemiskinan telah mengalami penurunan dalam kurun waktu 15 tahun. Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pada tahun 1990 adalah 1.8970 milyar jiwa, sementara pada tahun 2015 adalah sebesar 731.000 juta jiwa. Terjadinya penurunan presentase sebesar 24% menjadikan sebuah optimisme bahwa kemiskinan dapat dientaskan tiap tahunnya.

Untuk kasus kemiskinan di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dunia pada tahun 2011 hingga 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 sebesar 11.046.74 juta jiwa sedangkan pada tahun 2017 sebesar 10.272.55 juta jiwa. Sehingga selama tujuh tahun, kemiskinan mengalami penurunan persentase sebesar 1,97%.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin (dalam juta jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2011-2017.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam juta)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2011	11.046.75	9,23
2012	10.507.77	8,60
2013	10.634.47	8,52
2014	10.356.69	8,16
2015	10.619.86	8,22
2016	10.485.64	7,33
2017	10.272.55	7,26

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 33 provinsi. Tingkat kemiskinan tiap provinsi juga berbeda-beda, tergantung pada jumlah

penduduk di provinsi tersebut, tingkat pendidikan, dan faktor-faktor lain yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari lima kabupaten dan satu kota. Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat dilihat persentase penduduk miskin di lima Kabupaten/Kota Provinsi DIY selama kurang dari 1 dekade. Persentase kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 23,62%, kemudian diikuti oleh Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman sebesar 23,03%, 17,28% dan 10,61%. Kemudian persentase kemiskinan terendah berada di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 9,62%.

Tabel 1. 2
Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2011-2107.

Tahun	Presentase Kemiskinan					
	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta	Provinsi DIY
2011	23,62	17,28	23,03	10,61	9,62	16,14
2012	23,32	16,97	22,72	10,44	9,38	15,88
2013	21,39	16,48	21,7	9,68	8,82	15,03
2014	20,64	15,89	20,83	9,50	8,67	14,55
2015	21,40	16,33	21,73	9,46	8,75	14,91
2016	20,3	14,55	19,34	8,21	7,7	13,34
2017	20,03	14,07	18,65	8,13	7,64	13,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY dari tahun 2011 sampai tahun 2017 menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program. Terdapat beberapa faktor penyebab penurunan tingkat kemiskinan antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten, dan Jumlah Penduduk Santiko (2009), Ayu (2018), Rahmawati (2017), Shafira (2017), dan Wibisono (2015).

PDRB adalah hasil pendapatan dari jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (Badan Pusat Statistik, 2000). PDRB di provinsi DIY digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Variabel ini juga merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya, membuat perencanaan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan (Shafira, 2017).

Provinsi DIY mengalami kenaikan PDRB selama 7 tahun terakhir (lihat pada tabel 1.3.). Berdasarkan tabel tersebut kenaikan PDRB tiap daerah sebesar 0,12% - 0,14%, hal ini disebabkan karena sektor dominan yang berpengaruh di tiap daerah juga berbeda. PDRB dapat mengentas kemiskinan dengan pemanfaatan sektor yang lebih potensial melalui pengembangan di sektor pariwisata, perkebunan, pertanian, dan industri. Dengan kenaikan PDRB akan mengurangi jumlah kemiskinan tiap tahunnya. Program-program pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan sumber PDRB seperti training keterampilan, binaan UMKM dan bantuan non tunai akan mendorong masyarakat untuk mengikuti program tersebut, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Nurfauziah, 2018).

Tabel 1. 3
PDRB Provinsi DIY Atas Dasar Harga Konstan 2000 (dalam Milyar Rupiah)
Tahun 2011-2017.

Tahun	PDRB Tiap Daerah (%)					
	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunung Kidul	Yogyakarta	DIY
2011	7,35	7,10	6,71	6,96	7,26	7,83
2012	7,37	7,12	6,73	6,98	7,28	7,85
2013	7,40	7,15	6,75	7,00	7,30	7,87
2014	7,42	7,17	6,77	7,02	7,32	7,9
2015	7,44	7,19	6,79	7,04	7,35	7,92
2016	7,47	7,21	6,81	7,06	7,37	7,94
2017	7,49	7,23	6,84	7,08	7,39	7,96

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Seperti halnya PDRB, pendidikan juga diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Pendidikan adalah upaya paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sosial-ekonomi, kesehatan, dan gizi baik tidak akan dapat bertahan tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Pada penelitian ini variabel pendidikan direpresentasikan dengan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan Tabel 1.4, rata-rata lama sekolah di Provinsi DIY mengalami kenaikan di setiap tahunnya, kecuali di tahun 2014 yang terdapat penurunan presentase sebesar 0,36%.

Tabel 1. 4
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi DIY Tahun 2011-2017.

Tahun	Jumlah (%)
2011	9,20
2012	9,21
2013	9,33
2014	8,84
2015	9
2016	9,12
2017	9,19

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan (Santiko, 2009). Salah satu faktor terpenting untuk keluar dari kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan akan memberikan pengaruh dalam jangka panjang dalam memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga pada tingkat tertentu (Wibisono, 2015).

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga dibutuhkan berfungsi sebagai pengasah kreativitas, peningkatan daya pikir, pembentukan pola pikir dan daya saing dalam menjalankan rutinitasnya. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan baru yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*). Pemerintah dapat melakukan investasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat. Sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitasnya, hal tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Indikator berikutnya yang juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi (Kuswantoro & Dewi, 2016). Menurut Ayu (2018), upah memiliki

pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Jika upah yang ditetapkan tinggi maka tingkat konsumsi juga akan ikut meningkat yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi DIY pada tahun 2011 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan. Kota Yogyakarta mempunyai upah minimum paling tinggi dibandingkan dengan keempat kabupaten lain. Diikuti dengan Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul. Perbedaan Upah Minimum tiap kabupaten atau kota disebabkan karena adanya perbedaan pendapat regional tiap daerah.

Tabel 1. 5
Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi DIY (dalam juta rupiah) Tahun 2011-2017.

Tahun	Upah Minimum Kabupaten/Kota				
	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunung Kidul	Yogyakarta
2011	808.000	808.000	808.000	808.000	808.000
2012	892.660	892.660	892.660	892.660	892.660
2013	1.026.181	993.484	954.000	947.114	1.065.247
2014	1.127.000	1.125.000	1.069.000	988.500	1.173.300
2015	1.200.000	1.163.800	1.138.000	1.108.249	1.305.500
2016	1.338.000	1.297.700	1.268.870	1.237.700	1.452.400
2017	1.448.385	1.404.760	1.373.600	1.337.650	1.572.200

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Indikator selanjutnya yang berpengaruh dalam tingkat kemiskinan adalah jumlah penduduk. Secara umum penduduk adalah total manusia yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah di suatu negara dan

menempati suatu wilayah tertentu dalam waktu yang lama atau jangka pendek (Santiko, 2009).

Dalam tabel 1.6, pada tahun 2011 jumlah penduduk kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY yaitu sebesar 3.509.997 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 4.336.136 jiwa. Diantara 5 kabupaten, Persentase kenaikan jumlah penduduk terbesar berada di kabupaten/kota Yogyakarta sebesar 1,95% sedangkan kabupaten Gunung Kidul sebesar 1,65%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah penduduk pada tiap tahunnya pada empat kabupaten dan satu kota di provinsi DIY. Faktor penyebabnya adalah banyak para pendatang ke DIY untuk menuntut ilmu dan akhirnya memilih untuk menetap atau membangun usaha di DIY (Nurfauziah, 2018).

Tabel 1. 6

Jumlah penduduk di kabupaten/kota provinsi DIY (dalam juta jiwa) pada tahun 2011-2017.

Tahun	Jumlah Penduduk					
	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunung Kidul	Yogyakarta	Provinsi DIY
2011	1.113.297	927.846	927.846	682.670	392.388	3.509.997
2012	1.130.140	941.414	941.414	688.135	395.134	3.552.462
2013	1.147.037	955.015	955.015	693.524	397.828	3.594.854
2014	1.163.970	968.632	968.632	698.825	400.467	3.637.116
2015	1.167.481	971.511	971.511	715.282	412.704	3.679.176
2016	1.180.479	983.527	983.527	722.479	417.744	3.720.912
2017	1.193.512	995.264	995.264	729.364	422.732	4.336.136

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Oleh karena itu, dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan,

Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Jumlah penduduk, diharapkan dapat membantu pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga kebijakan yang diterapkan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan beberapa uraian dan data tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana *“Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2017”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Yogyakarta?
5. Bagaimana hubungan PDRB, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Yogyakarta?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah menjelaskan bahwa penelitian ini hanya berfokus pada Pengaruh PDRB, Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode tahun 2011-2017.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Yogyakarta
2. Pengaruh Pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Yogyakarta.
3. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Yogyakarta.
4. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Yogyakarta.
5. Hubungan PDRB, Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah maupun dinas-dinas terkait diharapkan penelitian sebagai acuan dan rekomendasi untuk mengambil kebijakan serta mengatasi masalah kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi yang perlu diperhatikan untuk mengatasi kemiskinan.

2. Bagi dunia praktis diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang positif untuk meningkatkan pengetahuan dan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian ini dan yang topiknya berkaitan dengan penelitian untuk dijadikan sebagai referensi.
3. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan tentang keadaan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.